

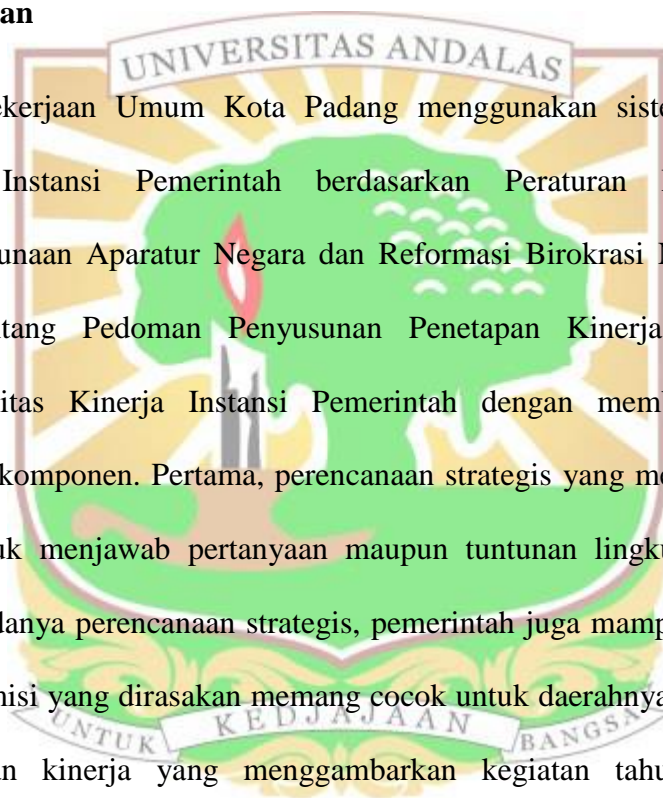
## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah selesai membahas serta menguraikan bab IV, maka penulis dapat memberikan kesimpulan serta saran yang dapat membangun untuk pembaca sehingga dapat dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat.

#### 5.1 Kesimpulan

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang menggunakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan membaginya menjadi beberapa komponen. Pertama, perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk menjawab pertanyaan maupun tuntunan lingkungan. Dan juga dengan adanya perencanaan strategis, pemerintah juga mampu menyelaraskan visi dan misi yang dirasakan memang cocok untuk daerahnya tersebut. Kedua, perencanaan kinerja yang menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilakukan pemerintah yang akan masuk didalamnya indikator apa saja yang akan dipenuhi atau direalisasikan untuk satu tahun kedepan. Pada perencanaan kinerja, pemerintah akan membuat penetapan kinerja yang berisi perjanjian kinerja yang akan diwujudkan oleh kepala daerah. Penetapan kinerja ini juga berfungsi sebagai pemantau serta pengendali pencapaian kinerja untuk satu tahun kedepan. Selanjutnya, pengukuran kinerja yaitu bagian yang harus



dilaksanakan oleh pemerintah untuk melihat apakah semua target yang dibuat telah terlaksana dengan baik yang berarti target serta realisasinya sesuai serta output yang dihasilkan memberikan dampak pada lingkungan. Setelah melaksanakan ketiga komponen tersebut, Pemerintah Daerah harus melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang akan menjadi bukti nyata keberhasilan dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tersebut.

2. Metodologi pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum merupakan suatu proses dimana pengukuran atas semua perencanaan yang dibuat apakah telah berhasil ataupun belum terealisasi dengan sempurna. Setiap indikator yang telah ditetapkan akan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya dan akan terlihat apakah target-target yang dibuat pada awal tahun anggaran terlaksana dengan baik serta dampaknya terhadap lingkungan akan semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Metodologi ini dimulai dengan menganalisis pencapaian kinerja serta capaian keuangan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Lalu, analisis berlanjut kepada refleksi atas apa yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut dengan menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupun peningkatan/penurunan dari kinerja pemerintah daerah dan juga menganalisis seberapa efisien penggunaan sumber daya pada Dinas Pekerjaan Umum. Setelah penganalisisan diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang juga menganalisis program/ kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dan mampu memberikan dampak besar dan positif terhadap lingkungan ataupun sebaliknya.

## 5.2 Saran

Setelah melihat serta memahami beberapa analisis keberhasilan/kegagalan yang dialami selama pelaksanaan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia khususnya SDM bidang teknis harus lebih ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan sehingga nantinya tersedia SDM bidang teknis yang handal dan berkualitas.
2. Mengupayakan memperoleh sumber dana/pembiayaan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat serta melakukan skala prioritas penanganan.
3. Mengusulkan dana di tahun berikutnya untuk pengadaan peralatan bidang ke PU-an yang dibutuhkan dan mengusahakan dana APBN serta APBD Provinsi dengan melakukan sinkronisasi kegiatan ke PU-an dengan SKPD terkait.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani masalah pertanahan dan pendekatan yang intensif dengan masyarakat.

